

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia Minta Kementan Tepati Janji Benahi Data Pertanian

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

May 25, 2021 - 23:35



Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera menepati janji soal pembenahan dan sinkronisasi data pertanian Indonesia. Menurutnya, data pertanian ini menjadi sangat penting karena akan menjadi pondasi penting dalam setiap tahapan dalam pengambilan keputusan. Apalagi, data pertanian ini menjadi basis dalam

penentuan prioritas program kerja guna mewujudkan pertahanan pangan.

“Kita itu butuh data. Data itu penting loh. Data ini pondasi berpijak mulai dari ada berapa jumlah petani, ada berapa luas tanah, volume potensi produksi, dan seterusnya. Kalau data ini tidak bisa ditentukan dengan sinkronisasi, maka tidak bisa ketemu sampai kapanpun. Mau ganti periode pun maka akan menjadi permasalahan yang sama karena datanya tidak pernah dibenahi,” tegas Riezky di sela Rapat Dengar Pendapat dengan para dirjen Kementerian Pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Dirinya pun juga menyayangkan beberapa program kerja Kementan menjadi tidak efektif dan tidak fokus akibat data pertanian yang tidak valid. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan mengakibatkan target pencapaian tidak akan terwujud. Riezky, mempertanyakan janji Kementerian Pertanian yang akan menyelesaikan pembenahan data lewat program agriculture forum.

“Tidak bisa kita (Komisi IV DPR RI,red) berbicara konkrit apabila data tidak pernah diselesaikan. Masalah data yang katanya akan terjawab dengan program agriculture forum, kami pertanyakan dong apa output-nya? Kok datanya masih berantakan?” tanyanya.

Seperti yang diketahui, program kerja sektor pertanian seperti mata rantai yang terintegrasi dengan beberapa mitra, setiap keputusan akan berpengaruh pada sektor lainnya. Ia berharap Kementan fokus menyelesaikan pembenahan dan sinkronisasi data.

Jika bicara soal pangan, maka penentuan prioritas berdasarkan data valid menjadi kewajiban. “Prinsipnya basic data is everything. Hari ini data itu menjadi pondasi agenda pemerintah ke depan. Ini masalah yang sangat mendasar,” pungkas Riezky. (ts/es)